

Analisis Kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka

Nivatul Hasanah^{1*}, Dwini Irfani^{2*}, Ardita Oksyaviani^{3**}, Habib Rizki^{4*}

¹Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

²Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

³Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

⁴Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Juli 2024

Direvisi pada tanggal 31 Juli 2024

Diterima pada tanggal 01 Agustus 2024

Tersedia online pada tanggal 01 Agustus 2024

Kata kunci:

perkembangan Sekolah, Guru Efektif, Mutu Pendidikan, Pengembangan Profesi, Sekolah



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

*Penulis Korespondensi:

Dwini Irfani

dwiniirfani@gmail.com

PENDAHULUAN

Kurikulum adalah komponen terpenting dari sebuah institusi pendidikan. Kurikulum terdiri dari sekumpulan rencana dan perjanjian mengenai hasil belajar, bahan kajian, prosedur, dan penilaian yang digunakan sebagai dasar program studi. Perguruan tinggi berusaha menciptakan sarjana yang bermoral, rasional, dan bertanggung jawab atas negara sesuai dengan keahlian mereka. Semua hal berubah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pendidikan dan lapangan kerja. Hal ini juga berpengaruh pada kemampuan lulusan perguruan tinggi. Untuk menghadapi perubahan, salah satu caranya adalah dengan mendorong siswa untuk lebih baik dan lebih siap untuk mengimbangi perubahan sosial budaya, kemajuan IPTEK, dan kemajuan industri.

Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan dan penyempurnaan sejak tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, dan 1997. Pada tahun 2004, kurikulum diubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi dan pada tahun 2006 menjadi kurikulum tingkat satuan. Pada tahun 2013, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mengembalikan kurikulum 2013 ke kurikulum 2013. Kurikulum yang ada saat ini terbilang unik, terutama untuk sekolah mengemudi. Alokasi waktu 180 jam per tahun tidak berubah tergantung komposisi mata pelajaran seperti matematika. Namun terdapat perubahan metode pelaksanaan

antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Mandiri: Kurikulum 2013 merupakan pembelajaran reguler, dan proyek dilaksanakan secara paralel, bukan berkelompok. Sebaliknya, kurikulum yang berdiri sendiri memungkinkan pembelajaran dilakukan sebagai satu kesatuan

Kurikulum merdeka yang menekankan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan keinginannya. Selain itu, bentuk lain mengacu pada struktur kurikulum saat Kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah menengah atas. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di era yang sangat dinamis ini, pembelajaran harus berubah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pembaharuan dengan menerapkan kebijakan belajar merdeka. Merdeka belajar bertujuan untuk mengubah gagasan tentang pembelajaran yang pada awalnya berfokus pada guru menjadi sistem yang berpusat pada peserta didik.

Kebijakan kurikulum Belajar-Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan kepada universitas untuk memanfaatkan peluang, tantangan, dan persyaratan untuk menjadi lebih inovatif, produktif, adaptif, dan terhubung dengan perubahan sosial, teknologi, industri, dan dunia kerja.

Kajian Pustaka

Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan

Kata kebijakan (Hasbullah, 2015: 37) merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "policy" yang berarti "menangani suatu persoalan atau kepentingan umum", dan oleh karena itu menitikberatkan pada tindakan (produk). Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi landasan dan landasan perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan suatu pemerintahan atau organisasi, sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud, dan untuk mencapainya. Ini berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen. Sasaran. Secara konseptual, para ahli mempunyai pandangan berbeda mengenai politik. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tindakan untuk mengatasi suatu masalah atau persoalan, serta mencakup tujuan, rencana, dan program yang akan dilakukan.

Kebijakan merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang seperti pejabat, pimpinan atau kelompok dari sebuah lembaga terkait keputusan yang ditetapkan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi yang memerlukan solusi tepat. Kebijakan juga menjadi upaya dalam memecahkan problem social bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan setidaknya harus memenuhi empat kriteria penting agar dapat dilaksanakan menjadi sebuah keputusan; yakni 1) tingkat hidup masyarakat meningkat, 2) terjadi keadilan by the law social justice, 3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dan 4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Noeng Muhajir, 2010).

Langkah-langkah Membuat Kebijakan

Langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan meliputi isu kebijakan, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

1. Isu Kebijakan

Isu-isu kebijakan bukan sekedar ketidaksepakatan mengenai tindakan aktual atau potensial. Namun mereka juga mencerminkan pandangan yang berbeda mengenai sifat masalah itu sendiri. Kemampuan mengenali perbedaan antara situasi problematis, permasalahan kebijakan, dan isu kebijakan, memahami cara menafsirkan peristiwa yang menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berbagai tindakan pemerintah aktual atau potensial yang penting untuk dilakukan.

2. Agenda Kebijakan

Tahapan pembuatan agenda politik (agenda setting) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Tahapan ini merupakan tahapan penting yang harus dilalui oleh suatu isu politik sebelum dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan pemerintah dan pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Hal ini karena tidak mungkin memasukkan isu-isu sosial ke dalam kebijakan kecuali pemerintah dilibatkan dalam menetapkan agenda terlebih dahulu.

3. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan pendidikan berarti merumuskan garis besar rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan, berbagai konsep dan prinsip yang melandasinya, serta pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Tahap perumusan kebijakan merupakan mekanisme sebenarnya penyelesaian permasalahan yang terdapat dalam

agenda kebijakan.

4. Legitimasi Kebijakan

Sebelum diterapkan, kebijakan perlu disahkan dan diperkuat secara hukum untuk memastikan penerapannya yang sah dan efektif. Legitimasi sangatlah penting karena kebijakan berdampak luas pada masyarakat, baik positif maupun negatif. Kebijakan juga memiliki implikasi anggaran yang harus dipertimbangkan pemerintah. Wewenang legitimasi umumnya dipegang oleh pemerintah atau badan legislatif. Namun, rakyat juga berperan penting dalam proses legitimasi, karena dukungan mereka menentukan kekuatan pemerintah. Legitimasi yang kuat menunjukkan dukungan rakyat dan memaksimalkan peluang kebijakan untuk mencapai tujuannya.

5. Komunikasi/Sosialisasi Kebijakan

Menurut Harton dan Hunt (1989), sosialisasi pada hakikatnya adalah suatu sistem yang memungkinkan pengambilan keputusan mencapai tujuannya. Program politik disosialisasikan untuk mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan. Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan mekanisme penyampaian informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini berlangsung melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

6. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu kegiatan dalam proses politik yang menentukan bagaimana kebijakan tersebut berkaitan dengan pelaku pendidikan dan diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan adalah proses yang selalu berubah di mana pelaksana kebijakan mengambil tindakan dan aktivitas untuk mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan kebijakan. Dengan kata lain Winarno (2008) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Implementasi kebijakan terdiri dari serangkaian kegiatan yang mengikuti perumusan kebijakan. Implementasi kebijakan memerlukan demonstrasi efektivitas kebijakan itu sendiri. Teori dan model implementasi kebijakan, pendekatan implementasi kebijakan, prosedur implementasi, faktor-faktor implementasi kebijakan, permasalahan dan hambatan dalam implementasi

Informasi Kebijakan

Penetapan kebijakan kurikulum merdeka adalah suatu usaha untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Penetapan kurikulum merdeka adalah perubahan dari kurikulum 2013. Kebijakan ini dibuat dengan alasan untuk memulihkan pembelajaran dari dampak pandemi covid-19 serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dimana kurikulum merdeka menawarkan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, dengan adanya perubahan kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi yang lebih berdaya saing di dunia global. Persiapan kebijakan ini mulai disusun pada tahun 2020, kemudian di implementasikan dan dievaluasi secara bertahap sejak tahun 2021, kurikulum merdeka resmi diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun ajaran 2024/2025 dan diterapkan di semua satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga jenjang pendidikan menengah. Kemendikbudristek sebagai pemrakarsa dan pengambil kebijakan utama menunjuk tim penyusun rancangan yang terdiri dari pakar pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan lain seperti guru, dosen, kepala sekolah, orang tua peserta didik serta sekolah-sekolah di Indonesia sebagai pihak yang akan menerapkan kurikulum. Tahapan kebijakan ini terdiri dari yang *pertama*, secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, *kedua* pengimplementasian secara bertahap yaitu dengan cara sekolah-sekolah dapat memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka secara penuh, parsial atau hanya menggunakan beberapa komponennya, *ketiga* mengadakan pendampingan dan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah oleh Kemendikbudristek untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, *keempat* melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum merdeka berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur yang menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan data yang dihasilkan berupa kata-kata atau uraian. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat penelitiannya adalah perpustakaan atau kepustakaan. Dalam studi ini, kami melakukan penelitian tentang "implementasi kebijakan kurikulum merdeka". Data yang terkumpul

kemudian diseleksi, disajikan, dianalisis, dan disusun secara ringkas dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan

Proses perencanaan penetapan kebijakan Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari identifikasi isu kebijakan, perumusan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan hingga sosialisasi kebijakan.

1. Identifikasi isu terkait Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka
Langkah awal dalam mengidentifikasi isu kebijakan kurikulum merdeka adalah melakukan analisis mendalam terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, yaitu terkait kualitas pembelajaran siswa, relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman, kesesuaian kurikulum dengan profil Pelajar Pancasila, kesenjangan akses dan mutu pendidikan serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya berdasarkan analisis isu tersebut, ditetapkanlah suatu isu kebijakan yang dirasa sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Pada kebijakan ini isu yang perlu ditindaklanjuti salah satunya yaitu masalah Pemahaman terhadap kurikulum masih kurang dan sulit menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Desain pembelajaran diubah dari kurikulum yang ada menjadi kurikulum yang unik, sehingga menimbulkan situasi sulit bagi guru. Dalam menerapkan kurikulumnya sendiri, guru harus mempertimbangkan kondisi dan konteks lingkungan untuk merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya.
2. Agenda kebijakan terkait Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka
Dari permasalahan atau isu mengenai pemahaman yang masih kurang terhadap kurikulum merdeka dan kesulitan dalam mengaplikasikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, adapun strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi tentang Kurikulum Merdeka secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas guru untuk memahami konsep dan prinsip Kurikulum Merdeka, dan menyediakan dukungan berkelanjutan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Sehingga dengan begitu Kurikulum Merdeka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
3. Formulasi kebijakan terkait Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka
Formulasi penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Pada tahap formulasi disusunlah rancangan kebijakan Kurikulum Merdeka yang mencakup profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, struktur kurikulum dan pedoman pengimplementasiannya.
4. Legitimasi kebijakan terkait Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka
Kebijakan kurikulum merdeka telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Kurikulum Pendidikan. Tingkat SMP. Peraturan ini merupakan kerangka hukum penerapan kurikulum mandiri. Namun sebelum Permendikbudristek ini diterbitkan, kurikulum mandiri sebenarnya sudah dikenal oleh sebagian besar pendidik dan lembaga pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka dikembangkan sejak tahun 2020 dan dilaksanakan serta dievaluasi secara bertahap mulai tahun 2021. Saat ini lebih dari 300.000 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia sudah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka.
5. Sosialisasi kebijakan terkait Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka
Proses sosialisasi kebijakan ini diawali dengan menyusun dan menyediakan materi sosialisasi yang mudah dipahami dan relevan, selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pemangku kepentingan meliputi guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah, orang tua dan siswa, serta masyarakat dan dunia usaha. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial seperti brosur, infografis, website, dll.

Implementasi Kebijakan Permendikbudristek No 12 Tahun 2024

Proses implementasi penetapan kebijakan Kurikulum Merdeka merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Pengimplementasian Kurikulum Merdeka dilakukan

secara bertahap, dimulai dari jenjang SMA pada tahun 2022, SMP pada tahun 2023, dan SD pada tahun 2024. Dalam implementasinya Kurikulum merdeka menghadapi berbagai tantangan, termasuk: Kurangnya sumber daya seperti buku dan peralatanteknis. Ketersediaan buku teks dan peralatan teknis yang sesuai sangat penting untuk mendukung penerapan kurikulum mandiri. Kurangnya sumber daya ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Tantangan lainnya adalah kurangnya pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan. Pelatihan yang tepat diperlukan agar guru dan tenaga kependidikan dapat memahami konsep dan tujuan kurikulum mandiri sertamampu membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masingsekolah. Waktu belajar yang terbatas juga menimbulkan tantangan dalam penerapan kurikulumyang unik. Kurikulum mandiri mengharuskan sekolah mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan keadaan individu siswa. Namun, ini mungkin memerlukan waktu lebih lama daripada kurikulum Anda saat ini. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan juga menjadi tantangan, seperti halnya penerapan kurikulum sendiri. Orang tua memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran di rumah anak- anak mereka, sehingga keterlibatan mereka sangat penting untuk memaksimalkan manfaat kurikulum merdeka.

Secara keseluruhan, masih terdapat tantangan dan hambatan dalam penerapan kurikulum yangunik. Tantangan-tantangan tersebut harus dijawab untuk memastikan penerapan kurikulum mandiri berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal kepada siswa.

Evaluasi Kebijakan Permendikbudristek No.12 Tahun 2024

Untuk memastikan implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kegunaan yang optimal bagi siswa, diperlukan tindak lanjut yang komprehensif dari pemerintah dan semua pihak terkait. Pertama, pemerintah perlu menyediakan sumber dayayang memadai seperti buku-buku pelajaran dan perangkat teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi guru dan tenaga pendidik harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memahami konsep dan tujuan Kurikulum Merdeka dengan baik, serta mampu mengembangkan kurikulumyang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Pemerintah juga perlu meninjau kembali alokasi waktu pembelajaran agar sekolah memiliki waktu yang cukup untukmengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan responsif serta orang tua perlu dilibatkansecara aktif dalam proses pendidikan agar mereka dapat mendukung dan memaksimalkan manfaat dari Kurikulum Merdeka bagi siswa. Selain itu, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul, sertamerumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Analisis Kebijakan Permendikbudristek No.12 Tahun 2024

Kurikulum Merdeka, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2024, merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk membuat sistem pendidikan lebih adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan industri. Kebijakan ini bertujuan untuk memusatkanpembelajaran pada peserta didik, memungkinkan mereka untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan belajar masing-masing. Melalui pendekatan yang lebih fleksibel, Kurikulum Merdeka mengintegrasikan pembelajaran reguler dan proyek menjadi satu kesatuan yang holistik dan bermakna. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa administrasi pendidikan memiliki pemahaman yang baik tentang kurikulum ini, namun sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut bagi pendidik tetap diperlukan untuk implementasi yang efektif.

Selain itu, Kurikulum Merdeka mendorong universitas untuk lebih inovatif dan adaptif melaluiKebijakan Belajar-Merdeka Kampus, yang bertujuan menyiapkan lulusan dengan keterampilanpraktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai tujuan, dengan penekanan pada perkembangan karakter, keterampilan berpikir kritis, dan kreativitas. Secara keseluruhan, Kurikulum Merdekadianggap sebagai langkah maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada pemahaman mendalam dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan.

Rekomendasi

Langkah-Langkah	Persoalan	Rekomendasi
-----------------	-----------	-------------

Isu kebijakan	Pemahaman terhadap kurikulum masih kurang dan sulit menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Desain pembelajaran diubah dari kurikulum yang ada menjadi kurikulum yang unik, sehingga menimbulkan situasi sulit bagi guru.	Belum sesuai
Agenda kebijakan	Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi tentang Kurikulum Merdeka secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas guru untuk memahami konsep dan prinsip Kurikulum Merdeka, dan menyediakan dukungan berkelanjutan kepada gurudan tenaga kependidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.	Belum sesuai
Formulasi kebijakan	Menyusun rancangan kebijakan Kurikulum Merdeka yang mencakup profil pelajar pancasila, capaian pembelajaran, struktur kurikulum dan pedoman pengimplementasiannya.	Sudah sesuai
Legitimasi kebijakan	Kebijakan kurikulum mandiri telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Kurikulum Pendidikan. Tingkat SMP.	Sudah sesuai

Sosialisasi/komunikasi kebijakan	Menyusun dan menyediakan materi sosialisasi yang mudah dipahami dan relevan, selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pemangku kepentingan meliputi guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah, orang tua dan siswa, serta masyarakat dan dunia usaha. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial seperti brosur, infografis, website, dll.	Sudah sesuai
Implementasi kebijakan	Masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam penerapan kurikulum asli. Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi untuk memastikan penerapan kurikulum mandiri berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal kepada peserta didik.	Belum sesuai
Evaluasi kebijakan	Pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai seperti buku- buku pelajaran dan perangkat teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, pelatihan dan pengembangan kapasitas.	Belum sesuai

Kesimpulan

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan baru pemerintah Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk mereformasi sistem pendidikan agar lebih adaptif, berpusat pada peserta didik, serta mengembangkan karakter, keterampilan berpikir kritis, dan kreativitas siswa. Proses perencanaan kebijakan Kurikulum Merdeka dilakukan secara sistematis, meliputi identifikasi isu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi, dan sosialisasi.

Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti kurangnya sumber daya, pelatihan bagi guru, keterbatasan waktu pembelajaran, dan kurangnya keterlibatan orang tua. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas guru secara berkelanjutan, meninjau alokasi waktu pembelajaran, melibatkan orang tua secara aktif, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, serta merumuskan solusi yang tepat agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi siswa. Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka dianggap sebagai langkah maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan.

Daftar Pustaka

- Adima, Moh Zidna Faojan. "Sosisalisasi kebijakan pendidikan." *MUNTAZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2.2 (2021).
- Aufaa, Marsaa Alyaa, and Eka Titi Andaryani. "Dampak Transformasi Pendidikan Nasional dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka: Kajian Literatur." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3.2 (2023): 150-156.
- Birkland, Thomas A. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. Routledge, 2019.
- Cholilah, Mulik, et al. "Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21." *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* 1.02 (2023): 56-67.
- Fadhli, Rahmat. "Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar." *Jurnal Elementaria Edukasia* 5.2 (2022).
- Gunawan Ade, M. Arif Surham, Muhammad Syaifuddin. *Evaluasi Kebijakan Pendidikan*. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3.1 (2023): 149-157.
- Madjid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru, 2018.
- Mailin, Mai. "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi: Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka." *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 4.1 (2021): 68-75.
- Miftah, Mohamad. *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Teori & Praktek*. PublicaInstitute Jakarta.
- Mulyasa, E. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka: Strategi dan Praktik*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Musfah Jejen. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Prenada Media, 2016.
- Muslich, M. (2021). *Kurikulum Merdeka: Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Oktavia Linda Sari, Nurhidayati Nurhidayati, Nurhizrah Gistituati. *Kebijakan Pendidikan: kerangka, proses dan strategi*. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6.1 (2021): 95- 99.
- Ramadhan, Iwan, et al. "Transformasi Kurikulum 2013 Menuju Merdeka Belajar Di Sma Negeri 1 Pontianak." *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 14.1 (2023): 53-62.
- Rusdiana. H.A. *Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati. 2021.
- Safrial, Ridho, Arifani Maulida Rahman, and Farid Setiawan. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan: evaluasi, pendidikan, kebijakan." *EDU MANAGE-Journal of STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai* 1.2 (2022).
- Setiawan, Farid, et al. "Implementasi kebijakan pendidikan." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 4.2 (2021): 362-365.
- Sos, Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, 2020. Sudjana, N. (2022). *Evaluasi Kurikulum Merdeka: Pendekatan Partisipatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, N.S. (2023). *Evaluasi Kurikulum Merdeka: Strategi dan Implementasi*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Sutapa Mada. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Buku Pegangan Kuliah*. 2005.
- Tilaar, H.A.R. (2021). *Kurikulum Merdeka: Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wuwur Erwin Simon Paulus Olak. *Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*. *Jurnal Ilmu Pendidikan* 3.2 (2023): 1-9
- Yansah, Okki, et al. "Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang." *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 2.5 (2023): 48-52.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30.2 (2020): 129-153.